

**Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025**

Lampiran XIX



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang alah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kemudahan berusaha (ease of doing business) yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun Kota Salatiga memiliki letak strategis dan potensi sumber daya manusia yang memadai, proses perizinan dan investasi terkadang masih dianggap kompleks dan memakan waktu. Ini dapat menghambat masuknya investasi baru dan pengembangan usaha yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menyederhanakan birokrasi, mengoptimalkan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga tahun 2026 disusun sebagai instrumen perencanaan tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2025-2029. Renja ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP guna mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Kota Salatiga memiliki potensi besar dalam sektor investasi, terutama di bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri kreatif. Peningkatan infrastruktur, stabilitas politik, dan kualitas hidup yang baik menjadikan Salatiga sebagai lokasi yang menarik bagi investor. Renja ini disusun untuk mengoptimalkan potensi tersebut dengan cara mempromosikan peluang investasi secara lebih agresif dan menyediakan layanan perizinan yang efektif, transparan, dan terintegrasi. Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil

Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang berpedoman pada RPJMD Kota Salatiga Tahun 2026 - 2029.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 dan proyeksi 2026 menunjukkan tren positif. Namun, persaingan antar daerah dalam menarik investasi semakin ketat. Oleh karena itu, Kota Salatiga perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya. Ini termasuk penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan promosi peluang investasi yang lebih agresif.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga telah menunjukkan kinerja baik dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Contohnya, masih adanya keluhan dari masyarakat mengenai lamanya proses perizinan untuk beberapa jenis usaha tertentu dan kurangnya sosialisasi tentang prosedur baru kepada para pelaku usaha. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sistem yang sudah ada.

Kota Salatiga memiliki keunggulan demografi dengan komposisi penduduk usia produktif yang signifikan. Ini merupakan potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi. Di sisi lain, munculnya bisnis-bisnis baru yang didorong oleh kaum muda, seperti industri kreatif dan digital, memerlukan dukungan dan fasilitas perizinan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, Renja tahun 2026 perlu menggarisbawahi program-program yang mendukung ekosistem bisnis bagi generasi muda dan UMKM.

Secara geografis, Kota Salatiga berada di lokasi yang strategis sebagai penghubung antara Semarang dan Solo. Hal ini menjadikannya lokasi yang menarik bagi investor di sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata. Potensi ini perlu dioptimalkan melalui penyusunan profil investasi yang menarik,

penyediaan data spasial yang akurat, dan pemetaan lahan strategis untuk investasi.

Dengan mempertimbangkan semua kondisi di atas, Renja DPMPTSP Kota Salatiga tahun 2026 diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi baru, dan memberikan pelayanan publik yang prima.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2/446/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam mencapai sasaran program kerja dibidang penanaman modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sampai dengan akhir bulan Noveember Tahun 2024 dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.782.107.233,- dan terealisasi sebesar Rp 4.128.084.295,- atau 86,32% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi.

Belanja Operasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.782.107.233,- (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 4.128.084.295,- (Empat miliar seratus dua puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebesar 86,32%.

2. Belanja Modal.

Pada Tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga tidak ada belanja modal.

Sedangkan jika dilihat dari program kegiatan terdiri dari

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp4.104.976.415,- (empat miliar seratus dua empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) yang terealisasi sebesar Rp3.643.336.645,- (tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 88,75%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp122.344.000,- (Seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp109.662.450,- (Seratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 89,63%.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp97.207.500,- (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terealisasi sebesar Rp92.050.000,- (Sembilan puluh dua juta

lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 94,69%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pelayanan penanaman modal sebesar Rp60.339.318,- (Enam puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terealisasi sebesar Rp34.219.000,- (Tiga puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sebesar 56,71%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp397.240.000,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terealisasi Rp248.816.200,- (Dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 62,64%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tersaji pada tabel TC-29.

Table TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Salatiga

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	90	89						
1	06	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100	6	6	100	6 laporan	2 laporan	
1	06	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6	100	6	6	100	6 laporan	2 laporan	
1	06	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN								
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30	20	26	26	100	26 Orang	26 orang	
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2	1	1	1	100	1 dokumen	0 dokumen	
1	06	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	12	12	12	100	12 dokumen	6 dokumen	
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	1	100	1 paket	1 paket	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	12	12	12	100	12 Laporan	6 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		292,82	12	12	12	100	12 laporan	6 laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	0	0	0	1 paket	1 paket	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	1	1	0	0	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100	1 laporan	1 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	6	6	100	6 Unit	4 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	19	19	19	100	13 Unit	5 Unit	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	1	1	100	10 unit	0 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	1	1	100	30 Unit	15 Unit	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	1	1	100	0	0	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	100	1 Unit	1 Unit	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	0	1	1	100	0 unit	0 Unit	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1	0	0	1 dokumen	0 dokumen	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	0	0	0	0	2 kegiatan usaha	0 kegiatan	
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1 dokumen	0 dokumen	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	1	1	100	1 dokumen	0 dokumen	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	0	1 Dokumen	0 dokumen	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	100	1	1	100	1 Dokumen	0 dokumen	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7876	998	1000			6000 Pelaku Usaha		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	133	196	200			100 Kegiatan Usaha		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0	1199	1200			10,000 Orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	20	20			2 Kegiatan Usaha		

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal								
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	200	200	200	100	100 Kegiatan Usaha.		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	399	100	100	100	100	300 Pelaku Usaha		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		133	100	100	100	100	100 Kegiatan Usaha		
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan								
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	0	0	0	0	1 dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, tidak terlepas dari perannya dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP dibidang pengelolaan sasaran yang telah ditetapkan melalui RPJMD 2026-2029 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026-2029.

Selama periode 2024, upaya promosi penanaman modal di Kota Salatiga oleh Pemerintah Kota Salatiga sudah membuahkan hasil. Pada tahun 2024 sampai dengan akhir tahun terdapat 361 investor berskala nasional, baik itu investasi dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Jumlah tersebut naik dari tahun 2023 yang sebanyak 256 investor, setelah sempat turun pada 2022 yang sebanyak 146 investor serta tahun 2021 dan 2021 yang hanya 62 dan 84 investor.

Dari hasil evaluasi antara target kinerja berdasarkan indikator kinerja dan realisasi yang dicapai sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat Indikator Kerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Pada indikator pertumbuhan nilai investasi dari target pertumbuhan nilai investasi Tahun 2024 adalah kenaikan sebesar 10%, capaian pertumbuhan nilai investasi sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 6,89 % karena capaian nilai investasi tahun 2023 adalah sebesar 593,922 Miliar rupiah sedangkan capaian nilai investasi hingga akhir Tahun 2024 adalah sebesar 634,853 miliar rupiah.
- b. Pada indikator kinerja nilai investasi, sesuai dengan target dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026-2029, untuk nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Salatiga adalah sebesar Rp456,712 miliar dan sampai dengan semester akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 342,886 miliar. Sedangkan pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target capaian kinerja Rp 196,602 miliar dengan capaian realisasi sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp291,967 miliar.
- c. Pada indikator persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional dengan target 2024 adalah naik sebesar 3%, dari sebanyak 256 investor pada tahun 2023 naik menjadi 361 investor pada akhir tahun 2024, sehingga capaian persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional Tahun 2024 adalah

41,02 % sampai dengan akhir tahun 2024 .

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)* (tw3)	Tahun 2025 (thn-n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		12		13
1	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN (%)			10,00	10,20	10,30	10,25	76,62	63,36	10,30	10,30	
2	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA (%)			10,00	10,25	10,50	10,75	43,61	-17,41	10,50	10,50	
3	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) %			3,00	3,50	4,00	5,00	75,34	41,02	4,0	4,0	
4	Pertumbuhan Nilai Investasi %			10,00	10,22	10,40	10,55	52,17	6,89	5,00	5,00	

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Hingga akhir tahun 2024 capaian kinerja perangkat daerah jika diukur dari indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dengan sasaran “ meningkatnya capaian realisasi investasi PMA dan PMDN” dan indikator Pertumbuhan Nilai Investasi, telah terealisasi sebesar 6,89%, artinya dibanding Tahun 2023 capaian investasi PMA dan PMDN mengalami kenaikan 6,89% atau naik Rp40,931 miliar dari nilai investasi tahun 2023 sebesar 593,922 Miliar rupiah menjadi 634,853 miliar rupiah pada akhir tahun 2024. Namun jika dilihat dari target pertumbuhan investasi tahun 2024 yang sebesar 10,22%, maka kinerja DPMPTSP pada tahun 2024 masih jauh target yang ditetapkan.

Selanjutnya terkait pelayanan di DPMPTSP Kota Salatiga dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan ada beberapa hal kritis yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Prosedur Perizinan; menjadi hal yang penting dalam pelayanan karena kejelasan dan kepastian prosedur menjadi salah satu tolak ukur kepuasan Masyarakat atas layanan perangkat daerah.
2. Efisiensi Waktu Pelayanan; menjadi hal kritis berikutnya karena seringkali waktu selesainya suatu produk layanan dianggap terlalu lama oleh masyarakat, karena masyarakat mengukur mulainya waktu pelayanan adalah saat bertanya atau berkunjung ke unit layanan. Sedangkan di DPMPTSP awal waktu suatu layanan adalah setelah semua berkas yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar. Ditambah lagi masih ada SOP yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai OPD teknis yang mengeluarkan rekomendasi teknis, hingga produk layanan terkesan lama selesainya.
3. Korupsi, Pungutan Liar dan Pencatutan Nama; Salah satu masalah paling serius adalah praktik korupsi dan pungli. Permintaan biaya di luar ketentuan resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat merusak kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang tidak sehat.
4. Kompetensi dan Sikap Petugas; petugas tidak kompeten, kurang ramah, atau tidak memahami regulasi yang berlaku membuat layanan DPMPTSP berkesan buruk. Petugas yang tidak profesional dapat memberikan informasi yang salah atau mempersulit proses perizinan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan investor.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Salatiga dalam hal pelayanan

penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Penerbitan perizinan masih dianggap terlalu lama oleh pelaku usaha akibat pemenuhan syarat dalam perijinan tidak segera dipenuhi oleh pelaku usaha.
- b) Inefisiensi Birokrasi dalam proses perizinan.
- c) Adanya ketidaksesuaian peruntukan wilayah yang diminati pelaku usaha/investor dengan zonasi pada tata ruangnya akibat lahan luas dengan kondisi clean and clear kurang tersedia dalam mendukung investasi.
- d) Kurangnya lahan yang luas, bebas dan bersih untuk dapat dijadikan lokasi usaha baru. Sampai saat ini Kota Salatiga hanya memiliki zona industri, belum ada kawasan industri yang artinya baru merupakan suatu area yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu daerah sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri. Zona ini mengacu pada fungsi peruntukan lahan, bukan sebagai entitas yang terkelola secara terpadu dan belum memiliki sarana infrastruktur dan fasilitas penunjang yang lengkap.
- e) Efektivitas Promosi yang belum optimal dalam menarik minat investor.
- f) Belum adanya Pemberian Insentif penanaman modal.
- g) Pengawasan pelaksanaan penanaman modal belum optimal.
- h) Belum optimalnya digitalisasi layanan lintas sektoral.
- i) Belum optimalnya mekanisme monitoring evaluasi perijinan berusaha berkala.
- j) Belum optimalnya pemanfaatan Tenan MPP oleh masyarakat.
- k) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Dari berbagai permasalahan pelayanan perangkat daerah tersebut diindikasikan dapat menimbulkan dampak yang bisa menghambat pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran Pemerintah Kota Salatiga dan pencapaian program prioritas. Terutama dalam pencapaian misi kedua yaitu; Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera ditindaklanjuti dan diselesaikan maka pencapaian misi Kepala Daerah tidak bisa tercapai dengan optimal. Demikian pula dalam pencapaian sasaran Pemerintah Kota Salatiga pada tujuan Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan sasaran Meningkatnya pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Salatiga dapat mengakibatkan dampak terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Salatiga tersebut. Dari berbagai dampak yang bisa

ditimbulkan pada pencapaian visi dan misi Wali Kota Salatiga pada tahun 2026 tersebut diharapkan dapat segera diselesaikan pada pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 nanti.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2026 nanti adalah tantangan dan peluang dalam mengembangkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Tantangan utama dalam rangka pengembangan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun sumber daya manusia (SDM). Seringkali, anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk modernisasi sistem secara menyeluruh, pelatihan pegawai, atau pemeliharaan infrastruktur yang memadai. Tantangan lain adalah komitmen nyata dari pejabat dan Kepala Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang jujur, berintegritas dan memihak kepentingan masyarakat.

Di balik setiap tantangan, terdapat peluang besar. Peluang terbesar saat ini terletak pada transformasi digital. Yang saat ini telah dimulai dengan diberlakukannya OSS (Online Single Submission) sejak tahun 2018 yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan usaha di Indonesia secara daring, menggantikan sistem manual dan tersebar di berbagai daerah. Pemberlakuan Online Single Submission (OSS) memiliki implikasi besar bagi pemerintah daerah, memicu perubahan mendasar dalam cara pengelolaan perizinan. Dampaknya mencakup aspek positif dan negatif, mengubah peran dan tantangan yang dihadapi dinas terkait, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP menjadi sentral dan unit koordinatif yang berwenang mengeluarkan semua perijinan di daerah. Dinas terkait yang selama ini mengeluarkan izin berubah fungsi menjadi unit kerja pemeriksa dan pemberi rekomendasi teknis atas kelayakan dan kebenaran persyaratan perizinan. Produk akhir perizinan akan diterbitkan melalui OSS. Peluang lain yang bisa timbul akibat pemberlakuan OSS bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah Peningkatan Kualitas Layanan dan Efisiensi layanan, Dimana OSS bisa mempermudah pengadministrasian perijinan yang dulunya manual menjadi digital. Dengan sebagian besar proses perizinan dilakukan secara otomatis oleh sistem, peran DPMPTSP bergeser dari sekadar menerima dan memproses berkas manual menjadi fasilitator dan pendamping. Ini berarti DPMPTSP memiliki peluang untuk memberikan layanan yang lebih proaktif, seperti membantu pelaku usaha yang kesulitan menggunakan sistem, memberikan konsultasi, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perizinan. Selain itu OSS menyediakan sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi, sehingga memungkinkan

pemohon melacak status permohonan secara real-time. Hal ini secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPMPTSP, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi. Peluang lain adalah Optimalisasi Kinerja dan Sumber Daya, karena dengan berkurangnya beban kerja administratif, DPMPTSP dapat mengalihkan sumber daya manusianya ke fungsi-fungsi yang lebih strategis dan bernilai tambah. Ini termasuk melakukan bimbingan teknis, mempromosikan investasi, dan melakukan pengawasan pasca-izin untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap komitmen mereka. Dengan sistem OSS sangat memudahkan pengumpulan data perizinan secara terpusat. DPMPTSP dapat memanfaatkan data ini untuk menganalisis tren investasi lokal, mengidentifikasi sektor-sektor potensial, dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan proses perizinan yang lebih cepat, mudah, dan efisien, DPMPTSP secara langsung berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini dapat menarik lebih banyak investor, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi di daerah tersebut. DPMPTSP memiliki peluang untuk mengintegrasikan layanan OSS dengan layanan publik lainnya di Mal Pelayanan Publik (MPP). Pendekatan ini memudahkan pelaku usaha mendapatkan semua layanan yang mereka butuhkan di satu tempat, memperkuat peran DPMPTSP sebagai pusat pelayanan terpadu yang saat ini sudah ada di Kota Salatiga sejak tahun 2022.

Pada rencana kerja tahun 2026 ada beberapa isu penting yang menjadi rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2026 berangkat dari pemahaman terhadap tantangan saat ini, terutama setelah pemberlakuan system Online Single Submission (OSS). Pergeseran ini menuntut DPMPTSP untuk mengubah peran dari sekedar loket perizinan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Antara lain:

1. Optimalisasi Layanan Digital Pasca-Pemberlakuan OSS.
2. Pergeseran Fokus dari Administrasi ke Promosi Investasi.
3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Budaya Pelayanan Prima.

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari kesimpulan permasalahan dan indikator kinerja yang belum tercapai masih berfokus pada peningkatan daya saing investasi, efisiensi pelayanan, dan transformasi digital. Beberapa isu utama meliputi peningkatan investasi, perbaikan regulasi serta efisiensi dan digitalisasi layanan. Sehingga rumusan isu strategis tahun 2026 adalah ; Peningkatan Daya Saing Investasi melalui efisiensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Transformasi Digital layanan yang terintegrasi.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proses pembandingan antara RKPD dengan hasil analisis OPD dilakukan untuk mengetahui apakah RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan awal RKPD untuk Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal terdiri dari 6 Program dan 12 Kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029 yang berfokus pada pencapaian RKPD Kota Salatiga Tahun 2025– 2029.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026:

Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 12 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 39 Sub Kegiatan
Pagu Renstra	: Rp5.735.052.000,-
Pagu Kebutuhan Indikatif	: Rp6.670.052.000,-

Review terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31
Review Terhadap RKPD OPD tahun 2026
KOTA SALATIGA

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	3.613.885	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	4.167.620	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.605	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	4.605	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.595.545	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.062.080	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2.577.122	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	3.044.800	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2	18.422	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2	17.280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21.185	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang yang diamankan	3	21.185	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah barang yang diamankan	3	23.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				227.517	Administrasi Umum Perangkat Daerah				247.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7.368	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan	1	8.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	11.974	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	13.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket	1	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	33.160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	36.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	35.002	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	38.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	11.053	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	12.000	
	Penyediaan bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	-	Penyediaan bahan/ material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	9.211	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	10.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	119.746	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242	130.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	1	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	1	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				495.141	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				537.540	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.605	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	5.000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	119.746	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	130.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	370.789	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	420.540	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				269.889	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				293.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	69.084	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	75.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	30.397	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	33.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	9.211	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	10.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	69.084	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	75.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	92.112	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (miliar rupiah)	648	120.667	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN (miliar rupiah)	648	141.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	43.645	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	51.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8	43.645	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8	51.000	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1	0	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	2	77.021	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	2	90.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	34.231	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	40.000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	42.789	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	50.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	10	53.425	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	10	58.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	180	53.425	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	180	58.000	
			Jumlah Promosi Penanaman Modal	1				Jumlah Promosi Penanaman Modal	1		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	0	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	53.425	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	58.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	97	234.253	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	97	254.313	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan	1722	234.253	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan	1538	254.313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7501	175.690	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	7144	254.313	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	110	29.281	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan	0	0	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12	29.281	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha	0	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	70	103.165	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	70	112.000	PAD
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKPM yang masuk	273	103.165	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKPM yang masuk	273	112.000	PAD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	25.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	8	40.000	/PAD
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200	53.165	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330	60.000	/PAD
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	110	25.000	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	110	12.000	/PAD
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	10	36.844	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	10	40.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	1330	36.844	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	1330	40.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	36.844	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang diolah dikaji dan dimanfaatkan	1	40.000	
TOTAL PAGU					4.162.242					4.772.933	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil identifikasi kebutuhan dari pengguna layanan perijinan dan pelaku usaha melalui forum komunikasi dan diskusi publik. Kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, diperoleh dua usulan yang sesuai dan dibutuhkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu ; (1) Pengadaan PC, Scanner, Laptop dan AC untuk kantor Yos Sudarso dan (2) Penyediaan Genset dan tambahan toilet untuk Mall Pelayanan Publik.

Sedangkan usulan yang masuk lewat musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk urusan penanaman modal dari aspirasi warga dan pokok pikiran DPR belum ada yang melibatkan peran langsung dari DPMPTSP. Namun harapan untuk peningkatan pelayanan perijinan selalu diungkapkan dalam berbagai forum. Sedangkan peningkatan pelayanan perijinan sudah menjadi tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan program prioritas dan kegiatan DPMPTSP Kota Salatiga.

Usulan program dan kegiatan Tahun 2026 terlampir sebagaimana dalam Tabel T.C.32.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
KOTA SALATIGA

Nama Perangkat Daerah :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyusunan Renja Tahun 2026 mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Visi Presiden “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 Misi Asta Cita; 17 Program Prioritas; dan 8 Program Hasil Terbaik yang di dukung oleh 320 Program Kerja. Asta cita sebagai Misi Presiden dituangka menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Pembangunan Nasional , Provinsi dan Kota Salatiga

	Nasional		Provinsi	Kota Salatiga	
	Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan		Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi	
	Prioritas Nasional	Quick Wins	Prioritas Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan
	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan	Menetapkan regulasi yang memberikan berbagai kemudahan penanaman modal, optimalisasi instansi perijinan terpadu dalam percepatan pelayanan perijinan, meingkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi	Peningkatan kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penguatan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan daya dukung investasi berbasis teknologi informasi

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 untuk mencapai tujuan Pembangunan “**Mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan**”. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”, dengan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis;
2. Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan;
3. Perwujudan Pembentukan Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga memiliki peran krusial dalam dua prioritas utama: Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis. Tugas pokok dan fungsinya akan menjadi motor penggerak untuk mencapai target-target pembangunan tersebut.

Dalam prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah poin Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan, DPMPTSP mempunyai peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Hal ini sejalan dengan dan berpengaruh langsung dengan prioritas provinsi untuk menguatkan perekonomian daerah, melalui peningkatan investasi dan kemudahan perijinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPMPTSP menjalankan beberapa fungsi antara lain sebagai pelayanan perizinan, promosi investasi serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pada arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah poin Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga mempunyai peran dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yang merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan adaptif. Dalam konteks ini fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Salatiga antara lain penyederhanakan proses birokrasi perizinan yang dulunya tersebar di berbagai instansi menjadi satu pintu pelayanan. Hal ini mengurangi waktu, biaya, dan kerumitan bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu DPMPTSP memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini sejalan dengan prioritas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, yang berorientasi pada kepuasan

masyarakat. Fungsi lain dari DPMPTSP adalah Menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, seperti OSS dan Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik), untuk mendukung pelayanan yang lebih transparan dan efisien.

Secara ringkas, DPMPTSP Kota Salatiga berfungsi sebagai fasilitator utama bagi investasi dan pelaksana reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Dengan mengoptimalkan tugas dan fungsinya, DPMPTSP akan memainkan peran vital dalam mewujudkan prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 di tingkat kota, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah **“Pengembangan Kota Salatiga sebagai jaringan distribusi pangan lokal untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh infrastruktur berkualitas yang mempermudah akses pasar,”**, dengan Prioritas Pembangunan, diarahkan pada :

- a. Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen.
- b. Pengembangan jaringan pasar daerah sebagai pusat distribusi pangan lokal
- c. Meningkatkan produksi pangan lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.
- d. Pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
- e. Peningkatan pemberdayaan sektor pertanian melalui diversifikasi pangan dan pengembangan budidaya potensial
- f. Pemanfaatan teknologi dalam pertanian melalui pengembangan irigasi pintar, penggunaan pupuk organik, dan sistem pertanian berbasis digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- g. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan Teknik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan diversifikasi tanaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.

Pembangunan tahap pertama tersebut selain difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan daerah, juga diarahkan pada Peningkatan Pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah didukung pemerintahan berintegritas dan infrastruktur berkualitas, yang diprioritaskan pada:

- a. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia

- b. Peningkatan pengelolaan potensi perekonomian daerah
- c. Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal
- d. Peningkatan identifikasi dan inventarisasi sumber daya serta masalah lingkungan hidup Kota Salatiga
- e. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan guna menunjang efektivitas layanan perkotaan

Untuk mencapai prioritas dan arah kebijakan pembanguna Kota Salatiga tahap pertama tersebut maka tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ini adalah : **“Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Salatiga.”**

Sedangkan sasaran penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga ditetapkan sebagai berikut:

1. meningkatnya realisasi investasi di Kota Salatiga dengan indikator sasaran pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN.
2. meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh kemudahan perizinan dengan indikator sasaran jumlah izin usaha yang diterbitkan.
3. Meningkatnya minat dan realisasi investasi berskala nasional dengan indicator sasaran jumlah investor yang melakukan proyek investasi yang berskala nasional.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2026
Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian di Kota Salatiga		Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42,22 %
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Salatiga dengan indikator sasaran pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN	6,91 %
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh kemudahan perizinan dengan indikator sasaran jumlah izin usaha yang diterbitkan	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	4,380 ijin
	Meningkatnya minat dan realisasi investasi berskala nasional	Jumlah proyek investasi berskala nasional yang dilakukan investor	364 investor

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya mendukung Program Prioritas Pembangunan Wali Kota Salatiga, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Program Prioritas Pembangunan Nasional dan pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja DPMPTSP Tahun 2026, maka dirumuskan Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Program: Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN

Berisikan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan (1) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Program: Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

Berisikan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub (1) kegiatan Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program: Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan

Berisikan kegiatan dan sub kegiatan:

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan (1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Program: Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk

Berisikan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, (2) Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, (3) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator Program: Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang

dikelola

Berisikan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: (1)Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program: Indeks Kepuasan Masyarakat

Berisikan kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan, antara lain:

- a. Perencanaan, Penganggarkan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan: (1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan: (1)Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, (2)Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : (1)Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, (2)Penyediaan peralatan rumah tangga, (3)Penyediaan bahan logistic kantor, (4)Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, (5)Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Fasilitas kunjungan tamu, (6)Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan (1)Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: (1)Penyediaan jasa surat menyurat, (2)Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, (3)Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan: (1)Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan, (2)Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, (3)Pemeliharaan mebel, (4)Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, (5)Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2026 di atas antara lain adalah keselarasan dengan dokumen

perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Rumusan program dan kegiatan dalam rencana kerja (renja) DPMPTSP tahun 2026 adalah penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Di mana dalam penjabaran Program dan kegiatan yang dirumuskan telah diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran strategis Wali Kota Salatiga seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029.

Sesuai dengan tahapan kebijakan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026 -2029, maka pada rencana kerja Tahun 2026 kegiatan prioritas adalah : Peningkatan iklim Investasi yang kondusif melalui penguatan regulasi dan peningkatan promosi Investasi dengan fokus penerbitkan regulasi yang memberikan kemudahan usaha dan insentif bagi kegiatan penanaman modal di Kota Salatiga dan menyediakan data dan bahan bahan yang akurat dan terbaru, merencanakan metodologi promosi yang efektif dalam mengenalkan potensi unggulan Kota Salatiga (Diversifikasi media, intensifikasi promosi, kerjasama lembaga investor).

Program prioritas Wali Kota Salatiga untuk Tahun 2025 -2029 salah satunya adalah “PROGRAM SIAKAS (SALATIGA AKUNTABEL, KOLABORATIF, ADAPTIF,DAN SIGAP” , Dimana dalam salah satu uraian programnya adalah membuat sistem terintegrasi sebagai asistensi masyarakat dengan pemda, memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan dan Mall Pelayanan Publik sebagai pusat layanan publik terpadu. Program prioritas tersebut telah masuk dalam perumusan program dan kegiatan renja Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Begitu pula dengan program prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam hal program prioritas Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis, perumusan program dan kegiatan renja Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga telah disusun untuk mendukung program prioritas tersebut.

Secara garis besar rencana kerja tahun 2026 membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.772.933.000,- . Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2026 adalah 6 (enam) Program , 12 (dua belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

TABEL T-C.33

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			90 Nilai	4.167.620.000,00						-	4.494.700.000,00
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 dokumen undefined undefined	5.000.000,00			Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	5.000.000,00
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD	-			88 %	3.062.080.000,00			Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3.151.700.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.044.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.133.700.000,00
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17.280.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		18.000.000,00
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang	-			1 Dokumen	23.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	25.000.000,00
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	23.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		25.000.000,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	-			6 laporan	247.000.000,00			-	Penguatan	-	-	315.000.000,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		20.000.000,00
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		50.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		150.000.000,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa umum	-			3 Dokumen	537.540.000,00			-	Penguatan	-	-	571.000.000,00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		6.000.000,00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	130.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		140.000.000,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	402.540.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		425.000.000,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 Dokumen	293.000.000,00			-	Penguatan	-	-	427.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		90.000.000,00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	33.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		35.000.000,00
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		12.000.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		90.000.000,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN 184 Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	-			645,52 Miliar rupiah 645,52 milyar rupiah 645.52 milyar rupiah	141.000.000,00						-	100.000.000,00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	100.000.000,00
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	51.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100.000.000,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta potensi	-			1 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha	-	0,00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	-			10 %	58.000.000,00						-	0,00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	-			218 Investor	58.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha	-	0,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	58.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan</i>	-			94 %	254.313.000,00						-	254.313.000,00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan				1946 ijin	254.313.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	254.313.000,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				7144 Pelaku Usaha	254.313.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		254.313.000,00
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk</i>	-			13 %	112.000.000,00						-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah LKPM yang masuk</i>	-			309 laporan	112.000.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah LKPM yang masuk</i>	-			309 laporan	112.000.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				10 Kegiatan Usaha.	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		40.000.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				100 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		100.000.000,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				200 Kegiatan Usaha	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	-			10 %	40.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	-			1450 Ijin	40.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha	-	40.000.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen Dokumen	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha		40.000.000,00	
	JUMLAH								4.772.933.000,00							5.029.013.000,00

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.772.933.000,00								5.029.013.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.772.933.000,00							5.029.013.000,00	
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			90 Nilai	4.167.620.000,00						-	4.494.700.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah undefined	-			6 dokumen undefined undefined	5.000.000,00			Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	5.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.000.000,00	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD	-			88 %	3.062.080.000,00			Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3.151.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3.044.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.133.700.000,00
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	17.280.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		18.000.000,00
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang	-			1 Dokumen	23.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	25.000.000,00
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	23.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		25.000.000,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum	-			6 laporan	247.000.000,00			-	Penguatan	-	-	315.000.000,00
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	13.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		20.000.000,00
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		50.000.000,00
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	38.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		15.000.000,00
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		150.000.000,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa umum	-			3 Dokumen	537.540.000,00			-	Penguatan	-	-	571.000.000,00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		6.000.000,00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	130.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		140.000.000,00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	402.540.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		425.000.000,00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			5 Dokumen	293.000.000,00			-	Penguatan	-	-	427.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		90.000.000,00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	33.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		35.000.000,00
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		12.000.000,00
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		90.000.000,00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	100.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan	-		200.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN Nilai Investasi berskala nasional PMA dan PMDN 184 Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	-			645,52 Miliar rupiah 645,52 milyar rupiah 645.52 milyar rupiah	141.000.000,00						-	100.000.000,00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	51.000.000,00			Melanjutka r	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	100.000.000,00
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	51.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka r	Penguatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100.000.000,00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Peta potensi	-			1 Dokumen	90.000.000,00			Melanjutka r	Penguatan	Pelaku Usaha	-	0,00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka r	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka r	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	-			10 %	58.000.000,00						-	0,00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	-			218 Investor	58.000.000,00			Melanjutka r	Penguatan	Pelaku Usaha	-	0,00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	58.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka r	Penguatan	Pelaku Usaha		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	-			94 %	254.313.000,00						-	254.313.000,00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan				1946 ijin	254.313.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	254.313.000,00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				7144 Pelaku Usaha	254.313.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		254.313.000,00
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	-			13 %	112.000.000,00						-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM yang masuk	-			309 laporan	112.000.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM yang masuk	-			309 laporan	112.000.000,00			Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha	-	140.000.000,00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		40.000.000,00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		100.000.000,00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pe	Penguatan ka	Pelaku Usaha		0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	-			10 %	40.000.000,00						-	40.000.000,00
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	-			1450 Ijin	40.000.000,00			Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha	-	40.000.000,00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen Dokumen	40.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n	Penguatan	Pelaku Usaha		40.000.000,00
	J U M L A H							4.772.933.000,00							5.029.013.000,00

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

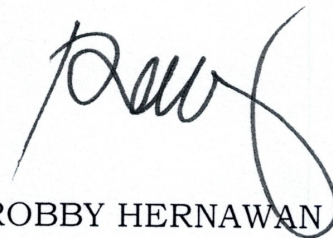
Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2026 ini antara lain:

- a. Dari pagu yang disediakan oleh tim anggaran Pemerintah Kota Salatiga tersebut belum memasukkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal, karena besaran alokasinya belum diketahui secara pasti nilainya. Sehingga pada saat alokasi DAK NF sudah ditetapkan akan masuk dalam pagu anggaran DPMPTSP Tahun 2026.
- b. Pada setiap pelaksanaan kegiatan DPMPTSP berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Anggaran gaji pegawai masih kurang dengan pagu 2026 masih 12 bulan. Kekurangan sekitar Rp 507.466.000,-.
- d. Gaji P3K Paruh Waktu juga masih kurang karena juga masih 12 bulan. Kekurangan anggaran sekitar Rp 63.879.228,-.
- e. Untuk Tenaga Non ASN yang menjadi Outsourcing Tenaga Administrasi saat ini masih belum ada standar harganya.
- f. Usul tenaga keamanan untuk kantor Yos Sudarso dan Mall Pelayanan Publik yang saat ini belum terakomodir anggarannya dengan kebutuhan dana sekitar Rp 72.000.000,-.
- g. Kebutuhan anggaran untuk retribusi pelayanan kebersihan persampahan sebesar Rp 720.000,-.

Rencana Kerja ini sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja dan program/kegiatan perangkat daerah tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2026 nantinya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga serta peran aktif stakeholder yang terkait.

Dalam pelaksanaannya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Salatiga ini disusun dengan kaidah sebagai panduan operasional yang bisa langsung dipakai dan disesuaikan dengan kondisi daerah. Prinsip umum dalam pelaksanaan Rencana Kerja adalah Keterpaduan dimana kegiatan Renja harus selaras dengan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, rencana provinsi/nasional, dan dokumen perencanaan terkait (RTRW, Renja OPD lain). Keterlibatan pemangku kepentingan yaitu pelibatan pelaku usaha, masyarakat, OPD teknis, asosiasi, DPRD sejak perencanaan sampai evaluasi. Dalam pelaksanaan prioritas program ditetapkan berdasarkan data potensi, hambatan, dan dampak ekonomi-sosial. Asas Akuntabilitas & transparansi selalu digunakann dalam pelaksanaan rencana kerja, dimana mekanisme pelaporan dan informasi publik terbuka dan dapat diakses dengan mudah (seperti realisasi investasi, perizinan). Kaidah berikutnya adalah fokus pada hasil (outcome) bukan hanya keluaran administratif; dalam pelaksanaan renstra juga mengukur perubahan iklim investasi dan kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya kaidah efisiensi & efektivitas anggaran juga menjadi perhatian dalam melaksanakan prioritas anggaran pada program yang berdampak tinggi. Yang paling akhir adalah kaidah keterukuran Dimana tujuan renstra dipecah ke indikator yang jelas, target kuantitatif dan kualitatif, serta baseline data yang akurat.

WALI KOTA SALATIGA.



ROBBY HERNAWAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala DPMPTSP
Kota Salatiga



Agung Nugroho, S.Sos., MM.
NIP. 197209111992031002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga



NUR KHOLIS, ST, MT
NIP. 19770704 200604 2 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso Nomor 16 Salatiga Kode Pos 50711 Telp (0298) 325639
Faks.(0298) 325639 Situs <http://dpmpstp.salatiga.go.id>
Surat elektronik dpmpstp@salatiga.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

Nomor : 000.7/24

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Tahun Anggaran 2026, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu anggaran Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja DPMTSP;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan

- untuk penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP;
- c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP tepat waktu;
 - g. melaporkan hasilnya pada Kepala DPMPTSP selaku Pengguna Anggaran.

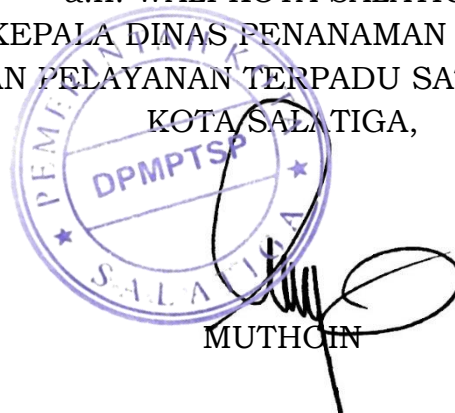
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 6 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SALATIGA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA,



MUTHOIN

Tembusan:

- 1. Wali Kota Salatiga;
- 2. Segenap anggota tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.7/24
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG :
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala DPMPTSP	Penanggung jawab
2	Sekretaris DPMPTSP	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Koordinator Kelompok Fungsional Penanaman Modal	Anggota
6	Koordinator Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Pejabat Fungsional pada Kelompok Substansi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
8	Pejabat Fungsional pada Kelompok Substansi Pengendalian Penanaman Modal	Anggota
9	Pejabat Fungsional pada Kelompok Substansi Perizinan I	Anggota
10	Pejabat Fungsional pada Kelompok Substansi Perizinan II	Anggota

a.n. WALI KOTA SALATIGA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA SALATIGA,

MUTHOIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.7/24
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026

AGENDA KERJA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan	2025																								
			Jan					Feb					Mar					Apr				Mei					
			I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V	
VI	Penetapan RKPD 2026 dan PRKPD 2025																										
6.1	Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD 2025	10-11 April 2025																									
6.2	Penetapan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	12-14 April 2025																									
6.3	Penyampaian Ranperbup oleh Kepala Bappeda kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan, penetapan dan pengundangan	29 - 31 Mei 2025																									
6.4	Penyampaian Perkada tentang RKPD 2026 kepada Gubernur	29 - 31 Mei 2025																									

a.n. WALI KOTA SALATIGA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA,


MUTHOIN